

# **PENGARUH INSENTIF PAJAK BBN KB TERHADAP JUMLAH WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR YANG TERDAFTAR DI SURABAYA BARAT**

**Nofanti Dwi Apsari**

**Mahasiswa, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya**

**novanti\_dwiapsari@yahoo.com**

## ***Abstract***

*This research aims to determine the effect of tax incentives BBN KB to the number of registered taxpayers in West Surabaya. Effect of tax incentives BBN KB calculated by comparing the amount subject to tax before the tax incentive BBN KB policies with current policy BBN KB tax incentives put in place. This research using descriptive method. Conclude from this study is the effect of tax incentives BBNKB effect on increasing taxpayer registered motor vehicles in west Surabaya.*

**Keywords:** *Tax incentives BBN KB, Taxpayers.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar belakang**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang dihimpun dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara maupun daerah yang sangat penting. Tanpa pajak, maka pembangunan nasional maupun pembangunan daerah tidak akan berjalan dengan lancar. Hal ini dikarenakan, banyak kegiatan negara maupun daerah yang sangat bergantung pada penerimaan negara maupun daerah yang berasal dari pajak. Roda pemerintahan dan pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dana dari penerimaan pajak negara maupun pajak daerah.

Apalagi dengan adanya otonomi daerah yang dimana pemerintah daerah dapat membangun daerahnya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Seperti yang sudah dikemukakan, bahwasanya pembangunan daerah sangat bergantung pada penerimaan pajak

daerah pada masing-masing daerah. Untuk mensukseskan pembangunan daerah, peranan penerimaan asli daerah sangat penting serta mempunyai kedudukan yang strategis. Adanya peningkatan kebutuhan dana pemerintah yang relatif cukup besar untuk menjalankan roda pemerintahan cenderung untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah dari sumber yang stabil, berasal dari masyarakat sendiri, dan dari realokasi dana yang berasal dari simpanan masyarakat.

Salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat diandalkan yaitu dari sektor perpajakan. Pemerintah daerah akan berusaha meningkatkan pendapatan daerah dengan memaksimalkan pajak daerah, yaitu pajak daerah tingkat I (Provinsi) seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBN KB. Pajak daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan. Perlu disadari dengan adanya peningkatan sumber pendapatan daerah, maka pembangunan daerah akan semakin berjalan dengan lancar. Untuk itulah pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mencoba meningkatkan minat wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu dengan membayar pajak daerah. Dengan meningkatnya minat wajib pajak untuk membayar pajak, maka sudah dapat dipastikan bahwa pendapatan asli daerah juga akan meningkat.

Oleh karena itu, banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan minat wajib pajak dalam membayar pajak. Salah satunya dengan memberikan insentif pajak kepada wajib pajak. Hal inilah yang juga dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur dalam rangka menarik minat wajib pajak dan meringankan beban wajib pajak atas adanya wacana kenaikan harga BBM, maka gubernur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2012 tentang pemberian insentif dan pengurangan pajak kendaraan bermotor. Yang dimana salah satu poin peraturan tersebut memberikan pembebasan

(pemutihan) bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II).

Dengan adanya kebijakan insentif pajak tersebut, pemerintah memiliki harapan akan semakin meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar dalam wilayah Jawa Timur. Ketika demikian, maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Dimana ini akan sangat membantu pembangunan daerah Jawa Timur. Akan tetapi permasalahannya adalah apakah dengan adanya kebijakan tersebut sudah selaras dengan harapan dari pemerintah daerah yaitu meningkatnya minat wajib pajak yang dimana akan berimplikasi pada meningkatnya jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Jawa Timur.

### **Rumusan Masalah**

Melihat uraian di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah pemberian insentif pajak BBN KB merupakan kebijakan yang dapat menarik minat wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak kendaraan bermotor daerah Surabaya Barat?”

### **Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu “Mengetahui pengaruh pemberian insentif pajak terhadap minat wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak kendaraan bermotor daerah Surabaya Barat”.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang dihimpun dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa diberikan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu bentuk penerimaan negara yang sangat penting bagi pembangunan negara. Hal ini dikarenakan hampir seluruh kegiatan negara disokong dan didanai oleh penerimaan negara yaitu pajak. Penggunaan uang pajak meliputi pembiayaan gaji pegawai pemerintahan sampai proyek pembangunan. Adapun penggunaan uang pajak untuk membangun sarana umum seperti jembatan, rumah sakit, sekolah, kantor polisi, dll.

Walaupun pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tidak membawa dampak atau manfaat secara langsung dan seimbang, namun manfaat pajak dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat lewat pembangunan fasilitas umumnya, subsidi kepada masyarakat miskin, membayar utang luar negeri dan memberikan bantuan UMKM dan pemodalan. Di Indonesia, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dibagi menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

### **Pajak Pusat**

Pajak pusat atau pajak nasional adalah pajak yang dihimpun dari masyarakat dan dikelola oleh pemerintah pusat yang sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan. Alokasi pajak pusat ini digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan pemerintah pusat yang sudah terencana dalam APBN dan untuk dialokasikan kepada pemerintah daerah. Pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN),

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

## **Pajak Daerah**

Pajak Daerah dan Pajak Nasional atau pajak pusat merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat, sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberi beban yang adil. Pajak Daerah diatur dalam:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Dimana maksud dari ketiga sumber hukum di atas adalah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan daerah dapat melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk pajak daerah. Pada hakikatnya tidak ada perbedaan pengertian yang pokok antara pajak pusat dan pajak daerah mengenai prinsip-prinsip umum hukumnya. Perbedaan yang ada hanya pada objek pajak, aparat pemungut dan pengguna pajak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak emndapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Sehingga, Pajak Daerah dapat diartikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah yang telah dihimpun dari masyarakat, akan dialokasikan dalam bentuk APBD untuk kepentingan pembangunan daerah tingkat provinsi maupun tingkat kota.

### **Jenis-jenis Pajak Daerah**

Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa pajak daerah terdiri dari beberapa jenis yaitu:

1. Pajak Propinsi yang terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak pengambilan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, dan
- e. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Restoran.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- g. Pajak Parkir.
- h. Pajak Lain-lain.

## **Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBN KB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang sangat memiliki pengaruh besar terhadap penerimaan asli daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010, pengertian dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor. Dimana penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di daerah kecuali untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan, untuk diperdagangkan, untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia dan digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olah raga bertaraf internasional.

Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan BBN KB adalah nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.

Setiap daerah memiliki peraturan tersendiri mengenai pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBN KB). Dasar hukumnya, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
- Keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2000 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2000 Di Jawa Timur
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, tarif BBN KB yang dikenakan untuk penyerahan pertama sebesar 15% dan penyerahan kedua sebesar 1%. Dan khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat, tarif penyerahan pertama sebesar 0,75% dan penyerahan kedua sebesar 0,075%.

### **Insentif Pajak**

Insentif pajak dalam peraturan perpajakan Indonesia dapat diartikan sebagai fasilitas pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam hal perpajakan. Insentif pajak banyak memiliki tujuan dalam bidang perpajakan. Ada kalanya pemerintah membuat kebijakan memberikan insentif pajak dengan tujuan untuk memberikan fasilitas perpajakan kepada investor agar menarik minat para investor. Namun, kadang kala pemberian insentif ini juga bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang ada agar mau membayar kewajibannya.

Menurut Barry Spitz dalam buku perencanaan pajak (Erly suandi : 2006), ada empat macam bentuk insentif pajak, yaitu:



1. Pengecualian dari pengenaan pajak
2. Pengurangan dasar pengenaan pajak
3. Pengurangan tarif pajak
4. Penangguhan pajak

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan penelitian (kualitatif)**

Menurut Poerwandari (1998) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain.

### **2. Jenis penelitian**

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya sesuai dengan variabel yang hendak diteliti. Penelitian ini memaparkan variabel-variabel yang hendak diteliti dalam pengaruh insentif pajak BBN KB terhadap jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar. Dimana variabel tersebut adalah kebijakan insentif pajak BBN KB dan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah Surabaya.

### **3. Teknik pengumpulan data**

#### **a. Studi lapangan**

Studi lapangan yang dilakukan dengan melakukan wawancara dengan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dan dokumen-dokumen yang ada di lapangan maupun yang diberikan oleh narasumber.

b. Studi dokumentasi

#### 4. Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian atau responden adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Barat yang berada di Jalan Bumi Indah No. 65 Surabaya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum**

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat yang digunakan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Pajak menjadi sumber penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah untuk mendanai program-program pembangunan. Dengan adanya kebutuhan pembangunan yang besar pada masing-masing daerah membuat banyak pemerintah daerah mencoba untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang pajak daerah. Salah satu kebijakannya dengan pemberian insentif kepada wajib pajak.

Pada tahun 2012 ini, gubernur Jawa Timur mengeluarkan peraturan baru tentang pemberian keringanan dan insentif pajak daerah yang tertuang dalam Pergub Jatim No. 28 Tahun 2012 yang isinya yaitu pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Angkutan Umum sebesar 25% dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan pokok dan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan seterusnya (BBN II), Pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda Pajak Kendaraan Bermotor. Peraturan ini dimaksudkan untuk membantu meringankan beban wajib pajak kendaraan bermotor dengan adanya kebijakan pemerintah pusat yang merencanakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. Namun, dengan batalnya rencana kenaikan BBM maka gubernur Jawa Timur mengubah peraturan tersebut dengan Peraturan

Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012 yang dimana menghapus pasal 2a tentang pemberian insentif kepada kendaraan umum. Akan tetapi pemberian insentif (pemutihan) pajak bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II – mutasi masuk/balik nama). Peraturan gubernur ini berlaku mulai tanggal 2 April – 31 Juli 2012.

Dengan berubahnya peraturan gubernur ini diharapkan wajib pajak kendaraan bermotor dapat memanfaatkan peluang ini untuk mengurangi beban dalam membayar pajak daerah. Dengan pemberian insentif ini, pemerintah juga memiliki harapan akan meningkatnya wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar. Peningkatan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor ini akan sangat berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki target pencapaian 20% pemohon atau wajib pajak.

### **Pengaruh Insentif Pajak BBN KB terhadap Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di Surabaya barat**

Peningkatan wajib pajak kendaraan bermotor khususnya dalam kasus pajak bea balik nama kendaraan bermotor memang memiliki banyak variabel. Namun pada penelitian ini, variabel yang digunakan untuk melakukan pengukuran adakah pengaruh yang diberikan dari peraturan gubernur yang memberikan insentif pajak kepada wajib pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan metode perbandingan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor. Jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang akan dibandingkan adalah jumlah wajib pajak kendaraan yang terdaftar sebelum adanya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012 dengan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar sesudah adanya peraturan tersebut.

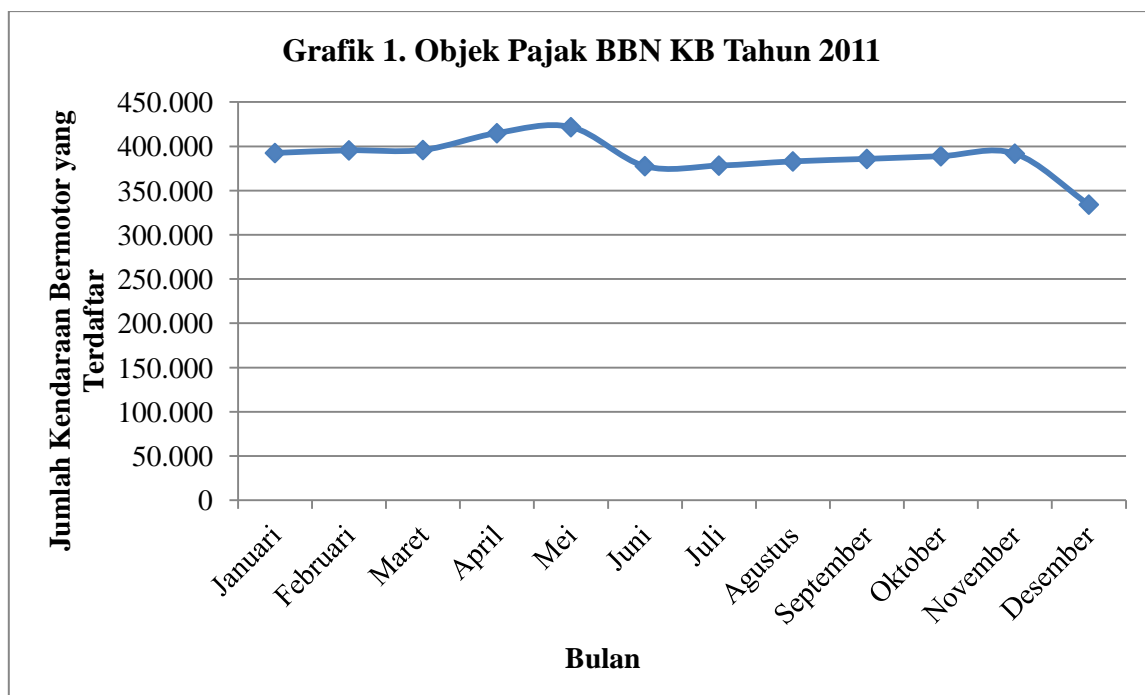
Dengan membandingkan jumlah yang ada akan terlihat adakah peningkatannya ataukah tidak ada peningkatan atau bahkan adanya penurunan jumlah wajib pajak. Berikut

adalah data yang didapat berkenaan dengan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar.

**Tabel 1. Obyek Pajak BBN KB  
Tahun 2011**

Bulan	Jumlah Obyek Pajak BBN KB
Januari	392.459
Februari	395.457
Maret	395.864
April	414.887
Mei	421.703
Juni	377.638
Juli	378.251
Agustus	382.984
September	385.770
Oktober	388.858
November	391.732
Desember	334.161

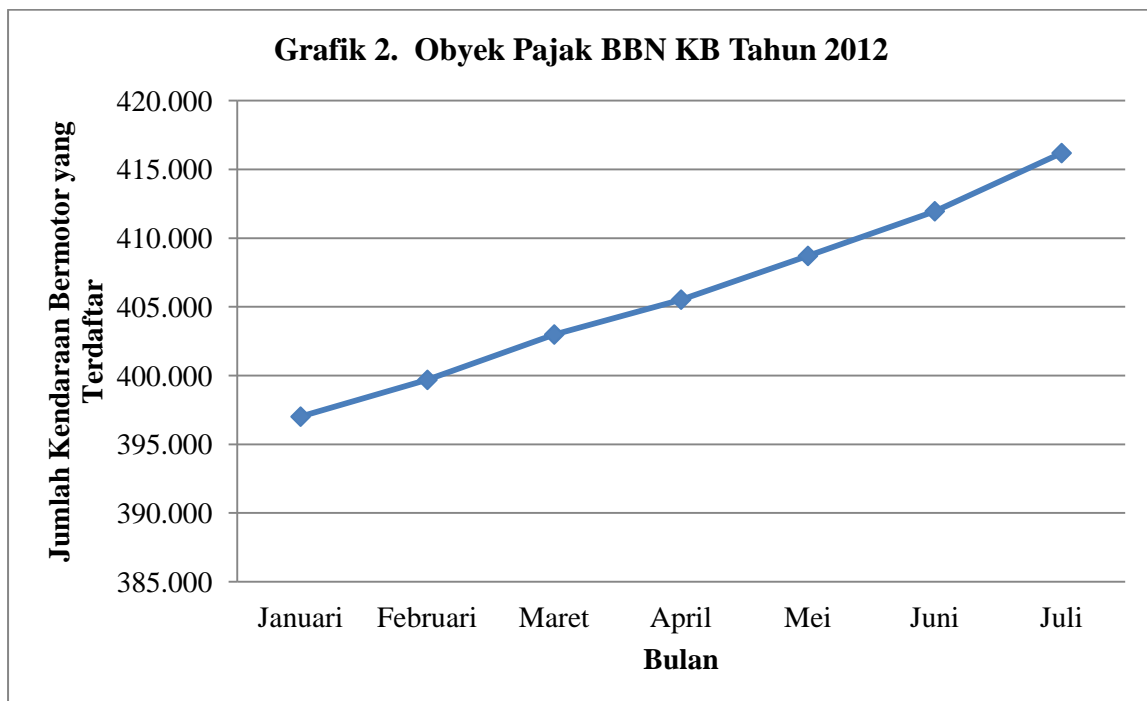
Sumber: Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Jawa Timur Surabaya Barat

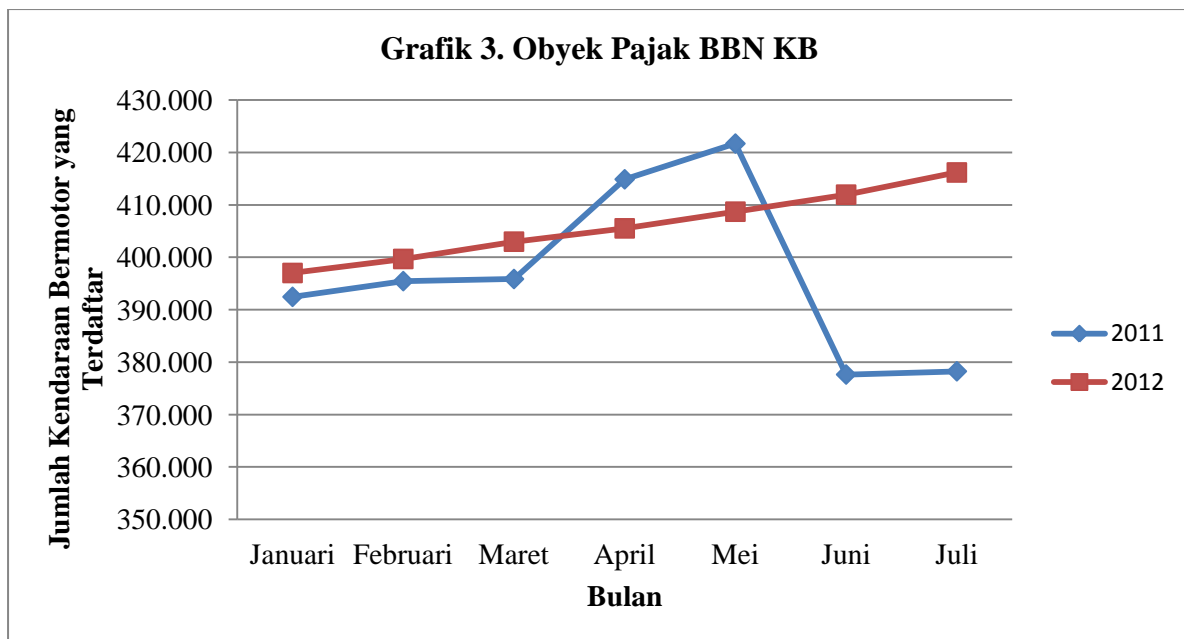


**Tabel 2. Obyek Pajak BBN KB  
Tahun 2012**

Bulan	Jumlah Obyek Pajak BBN KB
Januari	397.012
Februari	399.690
Maret	402.989
April	405.526
Mei	408.707
Juni	411.958
Juli	416.191

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Jawa Timur Surabaya Barat





Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa pengaruh insentif pajak BBN KB terhadap jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar berdasarkan jumlah obyek pajak pada bulan april – mei tahun 2011 dengan jumlah obyek pajak bulan april – mei tahun 2012 tidak berpengaruh. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti suku bunga bank yang berlaku, kemudahan dalam memperoleh kredit pembelian kendaraan baru, mutasi masuk, dll. Akan tetapi, perbandingan antara jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada bulan juni – juli tahun 2011 dengan jumlah obyek pajak pada bulan juni –juli tahun 2012 memiliki pengaruh yang signifikan yaitu sebesar 755.889 obyek pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada tahun 2011 dan 828.149 obyek pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada tahun 2012.

Secara teoritis, pemberian insentif pajak kepada wajib pajak merupakan sebuah strategi untuk menarik minat wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Dengan adanya kepatuhan wajib pajak, maka sudah dapat dipastikan penerimaan dari pos pajak akan semakin meningkat. Peningkatan ini akan berdampak baik pada perkembangan

pembangunan nasional maupun daerah. dengan tercukupinya dana pembangunan, maka upaya pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan rakyat akan berjalan dengan lancar.

Akan tetapi, pemberian insentif pajak khususnya pada pemutihan pajak bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya tidak selalu dapat membawa efek positif pada pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dikarenakan butuh banyak sosialisasi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah tentang kebijakan tersebut dan perbaikan pelayanan kepada wajib pajak agar strategi insentif pajak BBN KB dapat memberikan efek positif pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif pajak BBN KB tidak berpengaruh terhadap jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada awal bulan pemberlakuan kebijakan insentif yaitu pada bulan april dan mei. Hasil ini didapatkan dari jumlah wajib pajak pada bulan april - mei tahun 2011 lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada bulan april – mei tahun 2012 yaitu sebesar 836.590 obyek pajak pada tahun 2011 dan 814.233 obyek pajak pada tahun 2012. Akan tetapi, pada bulan Juni – Juli menampakkan adanya pengaruh yang signifikan dari kebijakan insentif pajak BBN KB terhadap jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar 828.149 obyek pajak yang terdaftar pada tahun 2012.

## **SARAN**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam pembangunan negara dan daerah. Hal ini dikarenakan dengan banyak kegiatan negara atau daerah yang didanai oleh pajak. Oleh karena itu penerimaan pajak ini harus terus

dikembangkan untuk membantu kegiatan pembangunan negara dan daerah. Pemerintah dapat menjadikan pemberian insentif sebagai upaya untuk menarik minat wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak yang nantinya akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara.

Dalam upaya peningkatan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar khususnya pada kasus pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang terdaftar, bukan hanya dipengaruhi oleh strategi pemberian insentif pajak oleh pemerintah daerah. Akan tetapi, banyak faktor yang dapat mempengaruhinya seperti tingkat suku bunga bank, pelayanan samsat, dll. Oleh karena itu, dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat memasukkan variabel lainnya yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Surabaya Barat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN

Keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2000 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2000 Di Jawa Timur

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah



Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Resqi, Muh. Zabrie., Abd.Rahman Kadir., dan Syamsu Alam. *Analisis Koordinasi Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Pada Kantor Bersama Samsat Wilayah I Makassar*. Jurnal Ilmiah.  
<<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/5f15d1aaf8c9ae3b218e8709152b9bd6.pdf>>

Suandy, Erly. 2006. *Perencanaan Pajak Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat

<http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak> Diakses pada tanggal 18 Juli 2012